

## **ABSTRAK**

Arin Tri Arbawati (02051200015)

### **KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN TANGGAL MUNDUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN**

(xv + 54 halaman : 0 gambar; 0 tabel; 3 lampiran)

Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum perjanjian tanggal mundur dalam hukum pembuktian. Perjanjian yang sah menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dengan kata lain bahwa semua pengaturan formil berlaku sebagai hukum terhadap pihak-pihak di dalamnya. Akibat hukum dari perjanjian tanggal mundur yang dilakukan dalam suatu perikatan yang dilakukan itu dapat diakhiri dengan salah satu dari pihak-pihak itu yang mengajukan permohonan pembatalan perjanjian bahkan tuntutan ganti kerugian. Pembuktian perbuatan melawan hukum dari perjanjian tanggal mundur perlu dilakukan dan diajukan alat bukti sebagai pendukung pembuktian. Karena perjanjian yang dibuat secara perjanjian tanggal mundur tidak diatur atau dilarang secara hukum, namun bisa juga menjadi perbuatan melanggar hukum, namun harus ada bukti nyata perbuatan melawan hukum dari perjanjian tersebut. Penting untuk terlebih dahulu melihat keadaan keabsahan bukti perjanjian tanggal mundur tersebut yang harus memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1321 KUH Perdata menekankan sahnya perjanjian, yang tidak boleh merupakan akibat dari kekeliruan, paksaan atau penipuan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu Undang-Undang dan doktrin atau terori-teori dari pakar hukum yang tertuang dalam sebuah literatur sebagai dasar penelitian. Metode penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian tanggal mundur berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Tanggal Mundur, Pembuktian.

Refrensi : 31 (1957-2022)

## **ABSTRACT**

Arin Tri Arbawati (02051200015)

### **THE LEGAL FORCE OF A BACK DATE AGREEMENT IN THE PERSPECTIVE OF THE LAW OF EVIDENCE**

(xv + 54 pages :0 picture; 0 table; 3 attachments)

*This study discusses the legal force of back date agreements in the law of evidence. A valid agreement according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, in other words that all formal arrangements apply as law to the parties therein. The legal effect of a back date agreement entered into in an engagement entered into can be terminated by either of the parties applying for cancellation of the agreement and even a claim for damages. Proof of unlawful acts from the back date agreement needs to be done and submitted evidence as evidence to support the proof. Because agreements made by back date agreement are not regulated or prohibited by law, but can also be unlawful, but there must be concrete evidence of unlawful acts from the agreement. It is important to first look at the state of validity of the proof of agreement of the date of retreat which must meet the legal conditions of the agreement. Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the agreement, which must not be the result of error, coercion or fraud. This research uses normative juridical, namely laws and doctrines or theories from legal experts contained in a literature as the basis for research. This research method is to analyze the legal strength of back date agreements based on applicable law in Indonesia.*

**Keywords :** Agreement, Back Date, Evidence.

**Reference :** 31 (1957-2022)